

KUALITAS SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN

Inne Anggarini Wihariyanti

inne.anggarini@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research has been conducted at Local government work at city of Surabaya. This research is meant to find out the influence of human resource, utilization of information technology, and internal control system to the reliability of local financial statement at Local government work at city of Surabaya. The research method has been done by using quantitative. The respondent of this research is head of service, head of department, head of sub department and staff at financial and accounting department at Local government work in city of Surabaya. There are 125 questionnaire has been issued, and it obtains 118 respondents are included to the data processing. The data analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions analysis. The result of this research shows that human resources gives positive influence to the reliability of local government financial statement, the utilization of information technology gives positive influence to the reliability of local government financial statement, and the internal control system gives positive influence to the reliability of local government financial statement.

Keywords: Human resource, utilization of information technology, internal control system, reliability of utilization of information technology.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Sampel penelitian ini sebanyak 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Responden penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dan staf bagian keuangan dan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya. Dari 125 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 118 responden yang dapat dimasukkan dalam pengolahan data. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, keterandalan pelaporan keuangan pemerintah

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap menerapkan akuntansi berbasis akrual, upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan (Rosalin dan Kawedar, 2011).

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005).

Upaya pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pada dasarnya, transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah tujuan reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat atau daerah.

Dalam mengelola keuangan pemerintah dengan baik dan benar, faktor kualitas sumber daya manusia sangat penting. Sebab untuk melaksanakan tanggungjawab dan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Pemanfaatan teknologi informasi mungkin mempengaruhi keterandalan pada pelaporan keuangan entitas akuntansi selain faktor sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik karena masih sedikit situs web pemerintah daerah yang update mengenai informasi keuangannya.

Informasi yang ada dari berbagai sumber menyatakan masih terdapat banyak salah saji di dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan terdapat penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Sampai saat ini masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang belum mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Fenomena tentang pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sesuatu hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai bahkan keliru. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang keuangan daerah dan sistem akuntansi agar menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan tidak bias bagi para pemakai laporan keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian kembali dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern sebagai variabel yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Konflik antara *principal* dan *agent* terjadi karena kemungkinan tindakan *agent* tidak selalu sesuai dengan keinginan *principal*. Kondisi ini semakin diperkuat oleh keadaan bahwa *agent* sebagai pelaksana operasional perusahaan memiliki informasi internal lebih banyak dibandingkan *principal*. Dalam hal ini, *principal* memberikan kewenangan dan otoritas kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan *principal* (Sutedi, 2011).

Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana *agent* tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Diakui atau tidak pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2006).

Laporan Keuangan Pemerintah dan Keterandalan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraf 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelajaran. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, (3) satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat

memenuhi kualitas yang dikehendaki: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami

Dalam penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan, ketepatanwaktuan dan keterandalan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Zuliarti, 2012). Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Faktor yang paling penting adalah sumber daya manusia, sebab yang membuat dan menjalankan segala sistem peraturan adalah sumber daya manusia itu sendiri. Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi tersebut merupakan keberhasilan organisasi itu dalam mencapai tujuan. Jika sumber daya manusia yang dimiliki organisasi itu berkompeten dan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan maka keandalan dalam pelaporan keuangan juga dapat dipercaya oleh pihak yang memiliki kepentingan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi selain teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan menghasilkan data yang akurat dan valid itu adalah hal penting dalam penyelenggaraan suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi. pemanfaatan teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting bagi pengelola keuangan karena dapat menunjang tugasnya dalam menyusun laporan keuangan dan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi.

Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan Sistem pengendalian internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan atau seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 juga dijelaskan bahwa unsur-unsur pembentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) antara lain: (a) Lingkungan, pengendalian, (b) Penilaian risiko, (c) Kegiatan pengendalian, (d) Informasi dan komunikasi dan (e) Pemantauan. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid dan dapat dipercaya, pemerintah harus melakukan pengendalian intern salah satu cara yaitu dengan mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) sehingga dapat mengurangi ketidaksengajaan dan ketidakberesan. Menurut Arfianti (2011) bahwa pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Hubungan Kualitas Sumber Daya Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah. Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Anggraeni (2014), Aini (2015), Azlan, *et al.* (2015), dan Yadnya, *et al.* (2017) menemukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sesuai dengan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diusulkan adalah :

H1 : kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pada perkembangan zaman yang pesat, untuk membantu meningkatkan kualitas dari informasi, hal terpenting dari teknologi informasi adalah komputer. Menurut Anggraeni (2014) dan Aini (2015) Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sedangkan menurut Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Azlan, *et al.* (2015), dan Yadnya, *et al.* (2017) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sesuai dengan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diusulkan adalah :

H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Hubungan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan

ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Sukmaningrum, 2012). Aini (2015), Azlan, *et al.* (2015), dan Yadnya, *et al.* (2017) mengungkapkan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Anggraeni (2014) sistem pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Sesuai dengan uraian diatas, maka hipotesis yang akan diusulkan adalah :

H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kausatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008), penelitian kausatif merupakan tipe penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini melihat seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya dengan kriteria kepala dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dan para staf bagian keuangan dan akuntansi dengan menjadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Surabaya sebagai objek penelitian ini.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti (Sekaran, 2006). Sesuai dengan objeknya, penentuan kriteria sampel didasari alasan bahwa kepala dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dan para staf bagian keuangan dan akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengambilan sampel dilakukan di 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya. Setiap SKPD diberikan 5 kuisisioner, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 118 responden. responden tersebut merupakan kepala dinas, kepala bidang, kepala sub bagian dan para staf bagian keuangan dan akuntansi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kuisisioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi identitas responden dan daftar pertanyaan tentang variabel-variabel penelitian. Pada daftar pertanyaan kuisisioner pengukuran indikator-indikator variabel menggunakan skala likert.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Keterandalan yang merupakan variabel dependen adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuisisioner, yang diadopsi dari Indriasari dan Nahartyo (2008) yang telah dikembangkan, yang masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima

poin, yaitu Sangat Tidak Setuju mempunyai skor 1, Tidak Setuju mempunyai skor 2, Netral mempunyai skor 3, Setuju mempunyai skor 4, dan Sangat Setuju mempunyai skor 5. Jumlah item pernyataan adalah 7 item dengan skala Likert 1-5.

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan para staf bagian keuangan dan akuntansi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari Soimah (2014) dengan 8 pertanyaan dan model skala likert lima poin.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, *et al.*, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari Soimah (2014) dengan 9 pertanyaan dan model skala likert lima poin.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang diadopsi dari Soimah (2014) dengan 10 pertanyaan dan model skala likert lima poin.

Statisik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009). Alat analisis data ini disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuisisioner, sehingga suatu kuisisioner dapat dikatakan *valid* jika pertanyaan yang tertera pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur melalui kuisisioner tersebut (Ghozali, 2006:64). Jika r hitung (untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item - total correlation*) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2001:135)

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel, sehingga kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel $> 0,60$ (Ghozali, 2006:42).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik mempengaruhi *kolmogrov-smirnov* (K-S). Jika hasil *kolmogrov-smirnov* menunjukkan hasil signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *kolmogrov-smirnov* menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Adanya multikolinieritas dapat diketahui jika nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Pengujian ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi yaitu metode regresi linier berganda. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{KPKPD} = a + b_1\text{KSDM} + b_2\text{PTI} + b_3\text{SPI} + e$$

Keterangan :

KPKPD	= Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
a	= Konstanta
b	= Koefisien regresi dari variabel independen
KSDM	= Kualitas Sumber Daya Manusia
PTI	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
SPI	= Sistem Pengendalian Intern
e	= error term

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (*R Square*) intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai *adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*) digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Adapun kriteria pengujian ini dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yaitu sebagai berikut: (1) Jika nilai kesesuaian model untuk pengujian signifikansi $> 0,05$, maka kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern ditolak yang berarti model penelitian tidak layak untuk diuji; (2) Jika nilai kesesuaian model untuk pengujian signifikansi $\leq 0,05$, maka kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern diterima yang berarti model penelitian layak untuk diuji.

Uji Signifikan (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Dengan menggunakan signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dan apabila nilai signifikansi untuk masing masing variabel $\geq 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial dari variabel kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Namun, apabila nilai signifikansi uji hipotesis t untuk masing masing variabel $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak H_1 diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh secara parsial dari variabel kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji signifikansi untuk memenuhi validitas yaitu membandingkan, jika r hitung (untuk r tiap butir) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Hasil uji validitas variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern diatas 0,181, hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dinyatakan valid.

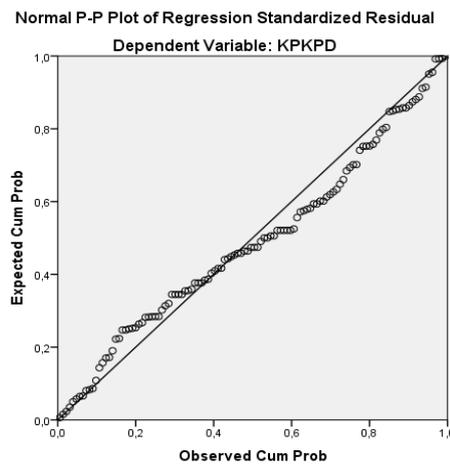
Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel, sehingga kuisisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban responden stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* setiap kontruk atau variabel lebih besar dari 0,60 sehingga semua item pada variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dapat dikatakan Reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 21, uji normalitas dapat dilihat pada analisis grafik dengan melihat grafik *Normal Probability Plot* sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah

Gambar 1
Grafik Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 1 Analisis grafik yang digunakan adalah analisis grafik *normal probability plot*. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		118
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,04488907
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,084
Kolmogorov-Smirnov Z		,923
Asymp. Sig. (2-tailed)		,362

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah

Pada tabel 1 menunjukkan hasil uji normalitas, dapat terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* untuk persamaan regresi signifikan diatas 0,05 maka didapat hasil uji *Kolmogorov-Smirnov Z* berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,362 > 0,05.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 21 diperoleh hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

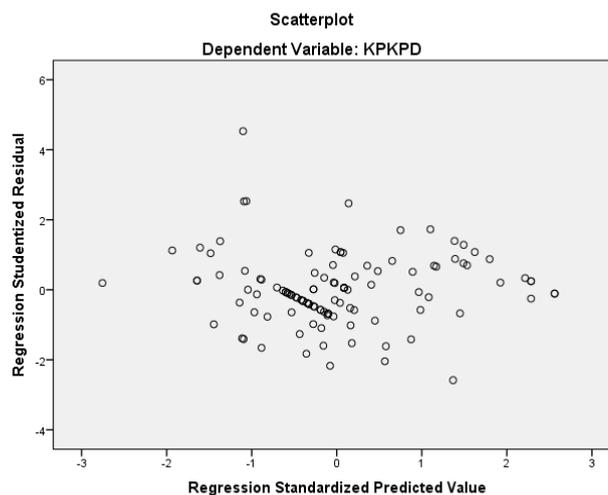
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KSDM	0,577	1,734
PTI	0,689	1,452
SPI	0,529	1,892

a. Dependen Variable: KPKPD
 Sumber: Data primer diolah

Pada tabel 2 diatas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 21 diperoleh hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah
Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji heteroskedastisitas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan digunakaannya persamaan regresi adalah untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis yang diperoleh dari SPSS 21 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Persamaan Regresi

<i>Coefficients^a</i>						
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		T	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
	(Constant)	5,043	2,231	2,261	,026	
1	KSDM	,390	,071	5,520	,000	,577
	PTI	,177	,064	2,766	,007	,689
	SPI	,232	,062	3,730	,000	,529

a. *Dependent Variable: KPKPD*

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil pada tabel 3 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KPKPD} = 5,043 + 0,390 \text{ KSDM} + 0,177 \text{ PTI} + 0,232 \text{ SPI} + e$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi dengan menggunakan aplikasi SPSS 21 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,781 ^a	,610	,600	2,07162

a. Predictors: (Constant), SPI, PTI, KSDM

b. Dependent Variable: KPKPD

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,610 atau sebesar 61 %. Dengan demikian, kontribusi dari variabel bebas yang terdiri dari dari Kualitas Sumber daya Manusia (KSDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Regresi Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (KPKPD) sebesar 61 %. Sedangkan sisanya sebesar 39% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

Hasil uji kelayakan model dengan menggunakan aplikasi SPSS 21 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Kelayakan (Uji F)

<i>ANOVA^a</i>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	764,866	3	254,955	59,408	,000 ^b
	Residual	489,244	114	4,292		
	Total	1254,110	117			

a. Dependent Variable: KPKPD

b. Predictors: (Constant), SPI, PTI, KSDM

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil tabel 5 tersebut menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 59,408 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 (*level of signifikan*), yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini

berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga model regresi ini layak untuk diuji.

Uji Signifikan (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat pada tabel 3 diatas, terlihat bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (KSDM) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, pemanfaatan teknologi informasi (PTI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007, sistem pengendalian intern (SPI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen ini berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Pembahasan

Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ (*level of signifikan*), dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berarti hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Azlan, *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang paling berpengaruh adalah kualitas sumber daya manusia sebab sumber daya manusia inilah yang terlibat dalam pengoperasian dan proses pembuatan serta pengolahan laporan keuangan agar menghasilkan informasi yang andal dan dapat di percaya serta salah satu pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan semakin baik kualitas sumber daya manusia yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut maka semakin baik pula tingkat keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $0,007 < 0,05$ (*level of signifikan*), dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berarti hipotesis kedua diterima.

Dalam pembuatan laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi juga penting seperti penggunaan komputer yang dilakukan secara optimal akan menghasilkan laporan keuangan yang andal dan pelaporan keuangan yang dapat dipercaya nilai informasinya. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Azlan, *et al.* (2015), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Yadnya, *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014), dan Aini (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan dan parsial terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dapat disimpulkan, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang ada

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut maka semakin baik pula tingkat keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ (*level of signifikan*), dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berarti hipotesis ketiga diterima.

Hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan kepala satuan perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD di lingkungan tempat kerjanya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan keuangan telah disesuaikan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yadnya, *et al.* (2017) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Azlan, *et al.* (2015) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014), dan Aini (2015) yang menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan dan parsial terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Pada dasarnya sistem pengendalian intern yang baik itu tidak akan lepas dari sumber daya manusia yang dengan benar melakukan tahap yang sudah diatur, karena sumber daya manusia itu sendiri yang menjalankan dan menerapkan sistem pengendalian tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang baik misalnya menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya nilai informasinya. Maka dapat disimpulkan semakin baik sistem pengendalian intern yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut maka semakin baik pula tingkat keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil kuisisioner yang dibagikan ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil penelitian ini menyatakan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia yang ada, maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin baik pula, (2) Hasil penelitian ini menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang ada, maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin baik, (3) Hasil penelitian ini menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang ada, maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya, peneliti memberikan saran dan implikasi atas hasil penelitian sebagai berikut: (1) Dalam penelitian ini ruang lingkup pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan dan Dinas di Kota Surabaya, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup serta objek penelitiannya, (2) Dalam penelitian selanjutnya perlu ditambahkan variabel yang belum diuji dalam penelitian ini, misalnya pengawasan keuangan, komitmen organisasi, akuntabilitas, transparansi dan variabel lain yang memiliki indikasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, (3) Sebaiknya penelitian selanjutnya melakukan wawancara agar data yang diperoleh valid dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, F. 2015. Pengaruh Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). *Jom FEKON* 2(2).
- Anggraeni, D. T. 2014. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Arfianti, D. 2011. Analisis Faktor - faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Azlan, M., T. Herwanti, dan E. Pituringsih. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual* 3(2): 188-198.
- BPK. 2017. Opini LKPD Kota Surabaya. <http://www.surabaya.bpk.go.id/>. 22 November 2017 (16.55).
- Ghozali, I. 2001. *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1).
- Indriasari, D. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Indriasari, D., dan E. Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*, Jakarta.
- _____, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta

- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pelaporan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Rosalin, F., dan W. Kawedar. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Santoso, S. 2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmaningrum, T. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sutedi, A. 2011. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Selemba Empat. Jakarta.
- Soimah, S. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah, Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkulu Utara. *Skripsi*. Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. 2010. Pengaruh SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten. *Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto*.
- Wilkinson, W., Joseph, M.J., Cerullo, Vasant Raval, dan B. Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. John Wiley and Sons.Inc.
- Yadnya, N. W. A., G. A. Yuniarta dan N. K. Sinarwati. 2017. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat). *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8(2).
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Universitas Muria Kudus, Kudus.